

UPAYA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU MENGANTISIPASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Oleh : Yusrah Febri Nuriaini

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
28293

Telp/Facs. 0761-63277

ABSTRACT

Education is an important aspect in the development of a nation. Almost every country prioritizes educational development among other developments. Education is a right for every Indonesian citizen and an obligation for the state. Even though it is clearly stated that the minimum education that every citizen must complete is twelve years, in reality there are still children in Pekanbaru City who have dropped out of school. And of the 15 sub-districts in Pekanbaru City, the number of children dropping out of school is mostly found in Tenayan Raya District. The background to this research is that even though the Pekanbaru City Government has issued a policy to deal with out-of-school children, there are still out-of-school children in Pekanbaru City.

The research method used in this research is a qualitative method with descriptive research type. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used in this research has stages such as data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research, it was concluded that there are no programs and fields that specifically deal with out-of-school children. The efforts made by the Education Department are by providing financial assistance sourced from zakat from employees within the Education Department and outreach to increase parents' understanding of the importance of education. However, these efforts have not yet run optimally because it can be seen that there are still parents who do not know about this.

Keywords: *Education, Dropout, Effor*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban bagi negara. Yang mana hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) 1945, pendidikan merupakan hak bagi setiap orang dan pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih ditemui angka anak putus sekolah di berbagai daerah-daerah khususnya di Kota Pekanbaru, yang mana putus sekolah merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Selanjutnya upaya pemerintah dalam mengatasi

penyebab anak putus sekolah dari segi ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana dan pemberian beasiswa, namun permasalahannya adalah belum meratanya, mekanisme dan sistem pemberian dana. Oleh karenanya perlu adanya upaya dalam membenahan sistem pemberian beasiswa terkait siapa, bagaimana dan untuk apa pemanfaatannya.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua juga menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan tertentu. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan, begitu juga dengan faktor lingkungan, faktor lingkungan yang dimaksud adalah adanya pandangan yang kurang tepat mengenai pendidikan, pendidikan dinilai belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak kedepannya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan melakukan kampanye pendidikan yang bekerjasama dengan perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan berupa sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi setiap individu. Melalui sosialisai diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Beberapa kebijakan pemerintah di atas dalam menekan angka anak putus sekolah dirasa belum terealisasikan dengan optimal, hal ini

karena masih ditemukannya anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah, pentingnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak pemerintah daerah terkait seperti kecamatan dan kelurahan dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 12 tahun. Selain itu pemberian bantuan dan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu harus dilakukan pendataan yang obyektif dan merata bagi masyarakat kurang mampu yang memang pantas menerima bantuan tersebut.

Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan anak putus sekolah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya, dilihat dari tabel berikut:

Jumlah anak putus sekolah per tahun di Kota Pekanbaru

No	Tahun	SD
1	2019	29
2	2020	37
3	2021	43
Jumlah		109

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah anak putus sekolah yang ada Di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019 angka anak putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 29 orang, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 37 orang, dan kemudian pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan menjadi 43 orang.

2. Kurangnya sosialisai kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan.

Selain mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan pemerintah juga perlu melakukan sosialisai kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, banyaknya anak putus sekolah dikarenakan kurangnya perhatian orang tua, dan juga faktor lingkungan anak. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisai terkait kebijakan-kebijakan tentang anak putus sekolah, seperti memberikan subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS, dan program wajib belajar 12 tahun, melalui sosialisai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan mengantisipasi anak putus sekolah Di Kota Pekanbaru, serta hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Mengantisipasi Anak Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2021”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimanakah Upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Mengantisipasi Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2021?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya Ilmu Pemerintahan.
2. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

Kajian Teori

1. Konsep Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat di definisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Sampara Lukman, Pelayanan adalah suatu kegiatan atau rangkaian aktivitas yang terjadi dalam interaksi langsung antara satu orang dengan orang lain atau mesin fisik dan menjamin kepuasan pelanggan.¹

Dalam pengertian lain, menurut Moenir pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena merupakan suatu proses. Sebagai suatu proses, pelayanan bersifat rutin dan

berkesinambungan serta melibatkan seluruh organisasi dalam masyarakat.²

2. Pelayanan Publik

Menurut Lijan Poltak Sinambela, istilah “publik” berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata publik sebenarnya telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia Baku yang berarti publik, yang berarti umum, banyak orang, dan ramai. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka publik dapat diartikan sebagai masyarakat luas atau umum.³

Menurut Moenir, pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan faktor-faktor melalui sistem, prosedur, dan cara tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud tugas aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.⁴

Menurut Fitzsimons dalam Sinambela menjelaskan indikator pelayanan publik yaitu:

1. *Reliability* yang ditandai dengan penyediaan layanan yang tepat dan Benar.
2. *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)

³ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan publik "teori, kebijakan dan Implementasi*, (jakarta: Bumi aksara, 2010)

⁴ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)

¹ Lijan Poltak Sinambela, Lukman, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

3. *Responsiveness* yang ditandai dengan keinginan untuk melayani konsumen dengan cepat.
4. *Empaty* yang ditandai dengan kesediaan untuk mengetahui keinginan dan Kebutuhan konsumen.⁵

Selanjutnya menurut Zeithalm dalam Hardiyansyah, kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu:

1. *Tangibles* (Berwujud)
2. *Reliability* (Kehandalan)
3. *Responsiveness* (Ketanggapan)
4. *Assurance* (Jaminan)
5. *Empaty* (Empati)⁶

3. Konsep Upaya

Menurut Poerwadarminta, upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya adalah segala sesuatu yang sifatnya mengusahakan terhadap sesuatu hal sehingga hal tersebut dapat lebih efisien dan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan serta fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilakukan.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian upaya diartikan sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.⁸ Upaya dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan melalui penyaluran tenaga dan pikiran. Upaya merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.⁹

4. Konsep Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata "*paedagogie*" yang berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*paes*" artinya anak dan "*agogos*" yang artinya membimbing. Jadi "*paedagogie*" berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa romawi pendidikan berasal dari kata "*educate*" yang artinya mengeluarkan sesuatu yang berasal dari dalam. Sedangkan dalam bahasa inggris pendidikan diistilahkan dengan kata "*to educate*" yang artinya memperbaiki akhlak dan melatih intelektual.¹⁰

Menurut Hasbullah pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan agar menjadi dewasa, guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi dalam arti mental.¹¹

5. Konsep Anak Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan suatu proses dimana seorang siswa terpaksa meninggalkan lembaga pendidikan tempat ia belajar. Artinya

⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

⁶ Hardiyansah. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi*. (Gava Media; 2015)

⁷ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2006)

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),1250.

⁹ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara. 2002)

¹⁰ Rahmat Hidayat dan abdillah, *Ilmu Pendidikan "Konsep,Teori dan Aplikasinya"*.(Medan:Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) 2019.)

¹¹ Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta. Raja Grafindo persada. 2009).

anak tersebut tidak bersekolah pada lembaga pendidikan formal, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah status ekonomi keluarga yang kurang mampu.¹²

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran akibat sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anak dan mengabaikan hak anak atas pendidikan yang baik.¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang artinya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tenayan Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan nasional, hampir semua negara menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar yang mana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Namun kenyataannya, masih terdapat permasalahan terkait anak putus sekolah. Faktor penyebab anak tidak

dapat mengenyam pendidikan adalah tugas pemerintah untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Hal ini menjadi faktor pendukung program prioritas pemerintah yang menjamin hak setiap masyarakat atas pendidikan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kota Pekanbaru tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dimana, pemerintah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya.

Maka dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan apa saja upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengantisipasi anak putus sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2021 melalui indikator-indikator berikut:

Reliability

Reliability atau kehandalan diartikan dengan penyediaan layanan yang tepat dan benar. Dalam mengantisipasi anak putus sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Melihat dari data angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yang mengalami kenaikan setiap tahunnya tentunya permasalahan anak putus sekolah perlu untuk diatasi,

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah melakukan perumusan terkait apa saja yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi anak putus sekolah yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan data anak rawan putus sekolah

¹² Rahmad.M, M. M. *Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah*. Vol. IV No. 2, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. 2016.

¹³ Sarfa Wassahua. *Analisis Faktor-faktor penyebab anak Putus sekolah Di kampung raya Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Vol. 1, No. 2, al-iltizam. 2016. 98.

2. Melakukan pembinaan pentingnya pencegahan anak rawan putus sekolah.

Kemudian adapun tindakan yang dilakukan dalam mengantisipasi anak putus sekolah yaitu :

1. Memberikan bantuan dana dan memberikan beasiswa untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa akan pentingnya pendidikan.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah adalah dengan gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran, yang diberikan kepada setiap aparatur pemerintah di kecamatan, kelurahan atau desa, untuk kemudian disosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat atas pendidikan. Upaya mengantisipasi anak putus sekolah melalui gerakan menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan masyarakat tentunya perlu dibarengi dengan tanggapan positif dari masyarakat, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan khususnya dalam meminimalisir angka anak putus sekolah.

Tangibles

Tangibles diartikan sebagai penyediaan yang memadai berupa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam mengantisipasi anak putus sekolah Di Kota Pekanbaru maka

diperlukan adanya pembagian tugas dan koordinasi untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

Berdasarkan indikator *Tangibles* disimpulkan bahwa terkait pembagian tugas dalam mengantisipasi anak putus sekolah tidak ada bidang yang secara khusus menangani dan mengantisipasi anak putus sekolah yang ada hanya bagian yang secara umum mendata anak putus sekolah, yaitu ada bagian PAUD dan PNF, bagian SD, dan bagian SMP. Dan setiap bidang memiliki tugas dan pokoknya masing-masing sehingga nantinya jika ditemui anak putus sekolah maka disesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian dari segi koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum berjalan seperti yang dijelaskan, karena koordinasi yang dilakukan baru sampai ke tingkat kecamatan belum sampai ketingkat kelurahan dan RT/RW.

Responsiveness

Responsiveness atau ketanggapan yaitu keinginan untuk melayani dengan cepat dan tepat. Anak putus sekolah merupakan permasalahan di bidang pendidikan yang hingga saat ini masih banyak ditemui, dan perlu untuk diatasi sesegera mungkin, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak ada program khusus yang Dinas Pendidikan lakukan dalam mengantisipasi anak putus sekolah, program yang dilakukan mengikuti program pemerintah pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan BOS yang mana program tersebut ada untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS merupakan dana yang terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran materi bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai penyelenggara program wajib belajar, selain itu, berbagai kegiatan lain dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Program BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik kurang mampu dari seluruh pungutan biaya memberikan kesempatan yang setara bagi siswa kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Pada tahun 2019 jumlah besaran dana yang diterima Rp 800.000,-/siswa/tahun, kemudian pada tahun 2020-2022 pemerintah menaikkan alokasi dana BOS menjadi Rp 900.000,-/siswa/tahun dan bertahan hingga saat ini. mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2023 mengalami perubahan, mekanisme transfer pada tahun 2019 yaitu dari RKUN ke RKUD lalu ke Rekening sekolah sedangkan pada tahun 2020-2023 mekanisme transfer yaitu dari RKUN langsung masuk ke rekening sekolah,

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, untuk memperluas akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada siswa melalui Kartu Indonesia

Pintar (KIP). PIP bertujuan untuk membantu biaya pribadi siswa seperti biaya transportasi, baju sekolah dan uang saku. Diharapkan dengan pemberian bantuan ini angka partisipasi sekolah meningkat dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan ekonomi.

Peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP akan diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ia tempuh. Berikut besaran dana yang diterima peserta didik seperti yang dikutip dari situs Kemendikbud.

- a) Peserta didik SD/SDLB/ paket A mendapatkan Rp.450.000,-/tahun
- b) Peserta didik SMP/SMPLB/Paket B mendapatkan Rp.750.000-/tahun
- c) Peserta didik SMA/SMK/SMALB/Paket C mendapatkan Rp.1.000.000-/tahun.

Empaty

Empaty yaitu ditandai dengan kesediaan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan permasalahan mengantisipasi anak putus sekolah, sebelum mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan maka perlu mengetahui apa faktor penyebab anak putus sekolah

Selain mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi masyarakat secara intensif dengan tujuan pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan pentingnya dan manfaat proses pendidikan atau sekolah kepada masyarakat sebagai bagian dari proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orang tua siswa putus sekolah disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mengantisipasi anak putus sekolah terkait pentingnya pendidikan dan juga tidak adanya bantuan dana yang diterima oleh orang tua anak putus sekolah,

Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dalam memberikan layanan kepada orangtua dan siswa dinilai kurang baik dan juga belum optimalnya pelaksanaan upaya mengantisipasi anak putus sekolah oleh Dinas Pendidikan melalui sosialisasi yang dilakukan dan juga bantuan dana yang diberikan tidak tepat sasaran, Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan ulang atau perlu meningkatkan cakupan penerima manfaat agar bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu secara merata.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi anak putus sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2021, didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada public berdasarkan indikator yang diteliti, dapat disimpulkan:

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengantisipasi anak putus sekolah adalah dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan masyarakat dan tentunya perlu dibarengi dengan tanggapan

positif dari masyarakat,. Adapun kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran dengan berbagai program pendukungnya belum terealisasikan secara optimal.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengantisipasi putus sekolah melalui pembagian tugas disimpulkan bahwa tidak ada bidang yang secara khusus menangani anak putus sekolah, yang mana dalam penanganannya disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hanya sampai ke tingkat kecamatan dan belum sampai ke tingkat kelurahan, RT dan RW.
3. Dinas Pendidikan tidak memiliki program yang secara khusus mengantisipasi anak putus sekolah, Dinas Pendidikan dalam hal ini hanya mengikuti program Pemerintah Pusat yaitu BOS dan PIP.
4. Adapun faktor penyebab anak putus sekolah yaitu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua, kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah dengan memberikan bantuan dana yang bersumber dari zakat pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan, namun upaya tersebut juga belum berjalan secara optimal karena terlihat dari masih terdapat orang tua

yang tidak mengetahui mengenai adanya bantuan dana dan sosialisasi yang dilakukan.

SARAN

Adapun saran atau masukan kepada beberapa pihak yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini :

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diharapkan agar lebih maksimal dalam meningkatkan upaya-upaya dalam mengantisipasi anak putus sekolah, serta dapat memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi anak, dan juga program wajib belajar dan sekolah paket, sehingga permasalahan anak putus sekolah dapat diminimalisir.
2. Kepada sekolah yang diharapkan dapat mengelola dan mengalokasikan dana bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tepat sasaran sehingga dapat lebih meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan.
3. Kepada Orang tua diharapkan mampu memberikan perhatian kepada anak, mendidik dan memberikan motivasi kepada anaknya, serta orang tua diharapkan melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardiyansah. (2015). *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasbullah. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta. Raja Grafindo persada.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan “Konsep,Teori dan Aplikasinya*. Medan:Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinambela, L.P. 2006. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan kelima.Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sinambela, Lukman. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Jurnal**
- Rahmad.M, M. M. *Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah*. Vol. IV No. 2, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. 2016.
- Wassahua,Sarfa.(2016).Analisis Faktor-faktor penyebab anak Putus sekolah Di kampung raya Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon, al-iltizam, Vol. 1, No. 2. 98.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar